

**PENERAPAN KEBIJAKAN PEMUTIHAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR DALAM MEMAKSIMALKAN
PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun) dalam
Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh:

**RIZKA PUJI WAHYUNI
NPM : 1851030297**

Jurusan : Akuntansi Syariah



**AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2023 M**

**PENERAPAN KEBIJAKAN PEMUTIHAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR DALAM MEMAKSIMALKAN
PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun) dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh:

**Rizka Puji Wahyuni
NPM : 1851030297**

Jurusan : Akuntansi Syariah

**Pembimbing I : Any Eliza, S.E., M.Ak
Pembimbing II : Yulistia Devi, M.S.Ak**

**AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2023 M**

ABSTRAK

Pemutihan pajak merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk membantu masyarakat yang belum memenuhi kewajiban pajak kendaraannya akibat pandemi covid-19 dengan memberikan pembebasan sanksi keterlambatan dengan tujuan untuk meningkatkan penerimaan pendapatan dari sektor PKB dan BBNKB. Namun dilihat dari realisasinya, pemerintah belum bisa memaksimalkan penerimaan pendapatan dari sektor PKB dan BBNKB.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kebijakan pemutihan pajak PKB dan BBNKB, untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat penerapan kebijakan pemutihan pajak, dan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemutihan pajak ditinjau dari *masalah mursalah*. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Penelitian ini dilakukan di Kantor Bapenda Provinsi Lampung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemutihan pajak di Lampung belum berjalan secara maksimal berdasarkan analisis empat indikator keberhasilan implementasi kebijakan menurut Edward III. Adanya kebijakan pemutihan pajak, terjadi lonjakan yang cukup signifikan terhadap penerimaan PKB pada tahun 2021, namun belum dapat memaksimalkan penerimaan PAD dikarenakan realisasi penerimaan PKB dan PAD pada tahun 2021 belum mencapai target. Faktor pendukung dalam penerapan kebijakan ini adanya dukungan dan kerjasama dari banyak pihak, pemanfaatan sistem informasi dan teknologi dan antusiasme masyarakat dalam menyambut kebijakan ini. Faktor penghambatnya adalah faktor ekonomi, belum bisa membayar pemutihan pajak melalui online, pandemi covid-19, kurangnya kesadaran wajib pajak. Implementasi kebijakan PKB dan BBNKB sudah sesuai dengan teori dan syarat-syarat *masalah mursalah* karena dapat memberikan kemaslahatan baik pemerintah maupun wajib pajak.

Kata Kunci : Pemutihan pajak, PAD, *masalah mursalah*

ABSTRACT

Tax bleaching is an effort made by the government to help people who have not fulfilled their vehicle tax obligations due to the covid-19 pandemic by providing exemption from late sanctions with the aim of increasing revenue from the PKB and BBNKB sectors. However, judging from the realization, the government has not been able to maximize revenue from the PKB and BBNKB sectors.

This study aims to analyze the implementation of PKB and BBNKB tax bleaching policies, to find out the supporting factors and inhibiting factors in the implementation of tax bleaching policies, and to analyze the implementation of tax bleaching policies in terms of masalah mursalah. The research used descriptive qualitative methods with interviews and documentation as data collection techniques. This research was conducted at the Lampung Province Bapenda Office.

The results showed that the tax bleaching policy in Lampung has not run optimally based on the analysis of four indicators of successful policy implementation according to Edward III. With the existence of the tax bleaching policy, there was a significant increase in PKB revenue in 2021, but it has not been able to maximize PAD revenue because the realization in 2021 has not reached the target. Supporting factors in implementing this policy are the support and cooperation of many parties, the use of information systems and technology, and the enthusiasm of the community in welcoming this policy. The inhibiting factors are economic factors, not being able to pay tax bleaching online, the covid-19 pandemic, lack of taxpayer awareness. The implementation of PKB and BBNKB policies is in accordance with the theory and requirements of masalah mursalah because it can provide benefits for both the government and taxpayers.

Keywords: *Tax bleaching, PAD, Masalah mursalah.*



**KEMETERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
ISLAM**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar, Tlp. (0721) 703260

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizka Puji Wahyuni
NPM : 1851030297
Prodi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Instansi : UIN Raden Intan Lampung

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **“Penerapan Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Memaksimalkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan hasil dari duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk serta disebut dalam footnote maupun daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan pada karya ilmiah ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusunan. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar kiranya dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Februari 2023



Rizka Puji Wahyuni
NPM. 1851030297



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul : Penerapan Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Memaksimalkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung
Nama : Rizka Puji Wahyuni
NPM : 1851030297
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Any Eliza, M.Ak
NIP.198308152006012009

Pembimbing II

Yulistia Devi, M.S.Ak
NIP.

Mengetahui

Ketua Jurusan Akuntansi Syariah

A. Zuliansyah, S.Si., M.M
NIP.198302222009121003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Penerapan Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Memaksimalkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung”** Disusun oleh Rizka Puji Wahyuni, NPM. 1851030297, Program studi Akuntansi Syariah, Telah di Ujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

Hari/tanggal : Kamis, 25 Mei 2023

Waktu : 10.00 – 11.30 WIB

Tempat : Ruang Sidang Dekanat Lt.3.1

Tim Penguji

Ketua : Ahmad Zuliansyah, M.M.

(.....)

Sekretaris : Sania Nuraziza, M.B.A.

(.....)

Penguji 1 : Siska Yuli Anita, M.M.

(.....)

Penguji 2 : Yulistia Devi, M.S.Ak.

(.....)

Mengetahui

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Prof. Dr. Nurwanto, MM., Act. CA

009262008011008

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."

(Q.S An-Nisa: 59)

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ
وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾

"Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui."

(Q.S Al-Baqarah: 216)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah atas segala limpahan rahmat yang telah diberikan Allah SWT kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Memaksimalkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung”. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW., yang syafaatnya kita nantikan di yaumul akhir kelak. Aamiin Yaa Robbal ‘alamin.

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan rasa terimakasih yang mendalam kepada:

1. Kedua orang tua yang aku sayangi Alm. Bapak Pujiyanto dan Ibu Ngaeniyatun yang tiada henti selalu mendoakan dan mendukungku hingga aku sampai di tahap ini, serta curahan kasih sayang yang tak terhingga. Teruntuk Alm. Bapak Pujiyanto yang belum sempat kuberikan kebahagiaan dan rasa bangga. Semoga kelak anakmu ini menjadi anak yang membanggakan kalian berdua.
2. Almamater tercinta kampus UIN Raden Intan Lampung yang telah menjadi tempat menempuh pendidikan dan tempat menimba ilmu.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Rizka Puji Wahyuni, dilahirkan di Sendang Ayu, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung pada tanggal 17 April 1999. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara yang terlahir dari pasangan Alm. Bapak Pujianto dan Ibu Ngaeniyatun. Jenjang pendidikan penulis adalah sebagai berikut:

1. TK Aisyah Bustanul Athfal Sendang Ayu Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah dan selesai pada tahun 2005.
2. SD Negeri 1 Sendang Ayu Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah dan selesai pada tahun 2011.
3. SMP Negeri 1 Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah dan selesai pada tahun 2014.
4. SMA Negeri 1 Kalirejo Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah dan selesai pada tahun 2017.

Pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung di Fakultas Ekonomi Bisnis Islam dengan mengambil Jurusan Akuntansi Syariah.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim...

Segala puji bagi Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan inayah-Nya dan memberikan segala kemudahan untuk berbagai urusan sehingga atas izin-Nya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, para sahabat, keluarga dan para pengikutnya agar mendapat syafaat di yaumul akhir kelak.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya dan sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Tulus Suryanto, M.M., Akt., CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, beserta wakil Dekan 1,2,3 dan jajaran.
2. A. Zuliansyah, S.Si., M.M selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Any Eliza, S.E., M.Ak selaku Pembimbing I dan Yulistia Devi, M.S.Ak selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan, masukan, motivasi, dukungan serta meluangkan waktunya untuk membina penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen, Pegawai dan Staff di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta staff Prodi Akuntansi Syariah yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis.
5. Kepala Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi dan lain-lain.
6. Kantor Bapenda Provinsi Lampung yang telah memberikan izin kepada penulis melakukan riset serta seluruh staff termasuk Bapak Syaiful Annur selaku Kasubdit Pajak I dan Ibu Fitria Handayani

Selaku staff Bapenda yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

7. Saudara-saudaraku, Mbak Rita Lestari, Mas Aan Setiawan, dan adikku Kurnia Ayu Saputri yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepadaku. Untuk keponakan ku Zhifara Fathiyaturrahma yang selalu memberikan kebahagiaan dan keceriaan kepadaku.
8. Teman-teman dan sahabatku yang telah menemani dan memberikan bantuan serta menjadi tempat berkeluh kesah selama perkuliahan Aprilia Karini, Dewi Anjani, Dwi Kusuma Wulandari, Maulia Jumyana, Mulia Susianti dan Yuli Yani Amelia.
9. Sahabatku dari kecil Mella Adistria yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
10. Seluruh teman-teman AKS C angkatan 2018 semoga kita semua sukses di masa depan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, baik dari segi penyajian maupun penyusunan materi. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran, kritik serta masukan yang membangun untuk penulis agar skripsi ini dapat menjadi rujukan atau sumber referensi yang bermanfaat bagi orang lain.

Bandar Lampung, Januari 2023
Penulis

Rizka Puji Wahyuni
NPM. 1851030297

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	11
D. Rumusan Masalah	11
E. Tujuan Penelitian	12
F. Manfaat Penelitian	12
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	13
H. Metode Penelitian	17
I. Sistematika Pembahasan	22
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Teori Implementasi Kebijakan	
1. Pengertian Kebijakan Publik	25
2. Pengertian Implementasi Kebijakan.....	26
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi	27
4. Tahap-Tahap Implementasi.....	29
B. Teori Kepatuhan	
1. Pengertian Kepatuhan	30

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan.....	30
C. Dasar-Dasar Perpajakan	
1. Pengertian Pajak.....	32
2. Fungsi Pajak.....	33
3. Jenis-Jenis Pajak	34
4. Prinsip-Prinsip Pajak.....	35
D. Pajak Kendaraan Bermotor	
1. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor	36
2. Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor	37
3. Subjek dan Objek Pajak Kendaraan Bermotor	37
4. Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor	38
E. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	
1. Pengertian BBNKB.....	39
2. Subjek dan Objek BBNKB	40
3. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara perhitungan BBNKB.....	40
F. Pemutihan Pajak	
1. Pengertian Pemutihan Pajak.....	42
2. Dasar Hukum Pemutihan Pajak.....	43
G. Pendapatan Asli Daerah	
1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah	44
2. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah	45
H. <i>Maslahah Mursalah</i>	
1. Pengertian <i>Maslahah Mursalah</i>	47
2. Syarat <i>Maslahah Mursalah</i>	49
3. Pandangan Ulama Mengenai <i>Maslahah Mursalah</i>	51

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek	53
B. Penyajian Fakta dan Data Penelitian	59

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

- A. Penerapan kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama kendaraan Bermotor 67
- B. Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penerapan kebijakan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 97
- C. Implementasi Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Ditinjau Dari *Maslahah Mursalah*..... 106

BAB V PENUTUP

- A. Simpulan 115
- B. Rekomendasi 116

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan di Provinsi Lampung Tahun 2017 s/d 2021	6
Tabel 1.2	Perkembangan Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2017 s/d 2021	8
Tabel 1.3	Perkembangan Target dan Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2017 s/d 2021	8
Tabel 1.4	Perkembangan Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2017 s/d 2021	10
Tabel 1.5	Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	14
Tabel 3.1	Perkembangan Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2017 s/d 2021	59
Tabel 3.2	Perkembangan Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2017 s/d 2021	60
Tabel 3.3	Perkembangan Target dan Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2017 s/d 2021 ...	61
Tabel 3.4	Data Bulanan Kendaraan Bermotor yang Melunasi Pajak Tahun 2019 s/d 2021	62
Tabel 3.5	Data Pemutihan 2021	65
Tabel 4.1	Prosedur Pelaksanaan Pemungutan PKB dan BBNKB pada Samsat.....	85
Tabel 4.2	Perkembangan Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2017 s/d 2021	90
Tabel 4.3	Perkembangan Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2017 s/d 2021	90
Tabel 4.4	Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung	91
Tabel 4.5	Data Pemutihan 2021	93

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Bapenda	57
Gambar 4.1 Sosialisasi kebijakan Pemutihan Pajak	70
Gambar 4.2 Pegawai Samsat Rajabasa	75
Gambar 4.3 Lokasi pemutihan pajak Samsat Rajabasa	76
Gambar 4.4 Alur pembayaran pemutihan PKB di Samsat.....	81
Gambar 4.5 Alur pembayaran pemutihan BBNKB di Samsat.....	81
Gambar 4.6 Antrian wajib pajak saat pemutihan pajak	105



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

Lampiran 2 : Hasil Wawancara

Lampiran 3 : Dokumentasi Pelaksanaan Pemutihan Pajak

Lampiran 4 : Surat Izin Penelitian



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal, agar dapat memahami dengan jelas dan mempermudah dalam memahami proposal skripsi ini, perlu dijelaskan pengertian dan penegasan arti dari beberapa istilah yang berkaitan dengan tujuan penulisan ini. Penegasan ini diharapkan agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai penggunaan beberapa istilah yang digunakan, dan langkah ini merupakan proses permasalahan yang akan dibahas.

Apun skripsi ini berjudul **“PENERAPAN KEBIJAKAN PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DALAM MEMAKSIMALKAN PENERIMAAN PENDAPATAN ASLIDAERAH PROVINSI LAMPUNG”**. Untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut:

1. Penerapan

Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

2. Kebijakan

Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan mengartikan kebijakan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah. Sedangkan, James E. Anderson mengartikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan

dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.¹

3. Pemutihan Pajak

Penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor adalah pembersihan maupun pencabutan sanksi denda karena terlambat membayar pajak kendaraan bermotor. Masyarakat menyebutnya dengan istilah Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor.²

4. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor.³

5. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Merupakan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

6. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan asli daerah yang dipisahkan dan lain-lain.⁴

Berdasarkan penjelasan dan batasan pengertian di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa penelitian ini ingin

¹Sri Suwitri, "Konsep Dasar Kebijakan Publik," *Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro*, 2008, 15-16.

²Tituk Diah Widajantie and Saiful Anwar, "Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan)," *Behavioral Accounting Journal* 3, no. 2 (2020): 132.

³Trisni Suryarini and Tarsis Tarmudji, *Pajak Di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 79.

⁴Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia* (Jakarta: PT Rajagrafindo, 2013), 51-52.

menganalisis bagaimana penerapan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dalam memaksimalkan pendapatan asli daerah.

B. Latar Belakang Masalah

Pendapatan daerah merupakan penerimaan yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam menunjang pembangunan daerah guna membiayai proyek-proyek dan kegiatan-kegiatan daerah. Menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diterima yang bersumber dari dalam daerahnya masing-masing dan dipungut berdasarkan peraturan daerah yang berlaku. Pendapatan daerah memiliki peranan yang sangat penting, karena dapat mengetahui sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan perekonomian dan pembangunan daerah.⁵ Peningkatan pendapatan asli daerah dan peningkatan belanja daerah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, karena dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, perbaikan infrastruktur dan pembangunan daerah.⁶ Sumber-sumber pendapatan daerah adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan asli daerah lain-lain yang sah.⁷

Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP) Pasal 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut N.J. Feldmann, pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh

⁵Phaureula Artha Wulandari and Emy Iryanie, *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah* (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2018), 26.

⁶Herlina Kurniati and Yulistia Devi, "Pengaruh Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016-2019 Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 7, no. 2 (2022): 187–208.

⁷Debby Islami and Lilik Rahmawati, "Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2017," *Journal Of Economics* 4, no. 2 (2020): 170.

dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum) tanpa ada kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.⁸ Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro,SH, pajak adalah kontribusi wajib oleh rakyat ke kas negara yang berdasarkan undang-undang serta dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.⁹

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah pungutan yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan undang-undang, pelaksanaannya bersifat memaksa dan tidak ada imbal balik secara langsung kepada wajib pajak. Pajak diperlukan untuk memutar roda pemerintahan demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya, karena pajak yang dipungut dari masyarakat nantinya akan digunakan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri.

Dalam Istilah Bahasa Arab, pajak dikenal dengan *Adh-Dharibah* atau bisa juga disebut dengan *AlMaks*, yang artinya “pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak. Menurut Imam al-Ghazali dan Imam al-Juwaini, pajak adalah apa yang diwajibkan oleh penguasa (pemerintahan muslim) kepada orang-orang kaya dengan menarik dari mereka apa yang dipandang dapat mencukupi (kebutuhan Negara dan masyarakat secara umum) ketika tidak ada kas di dalam baitul maal. Ada istilah-istilah lain yang mirip dengan pajak atau *adh-Dharibah* di antaranya adalah :

- a. *Al-jizyah* ialah upeti yang harus dibayarkan ahli kitab kepada pemerintahan Islam.
- b. *Al-Kharaj* ialah pajak bumi yang dimiliki oleh Negara islam.
- c. *Al-Usyur* ialah bea cukai bagi para pedagang non muslim yang masuk ke Negara Islam.

Pemungutan pajak sendiri telah tercantum dalam firman Allah SWT surah At-Taubah ayat 29:

⁸Mustaqiem, *Pajak Daerah Dalam Transisi Otonomi Daerah* (Yogyakarta: FH UII Press, 2008), 43.

⁹Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi Revisi 2011 (Yogyakarta: Andi, 2011), 11.

فَتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan AlKitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah,dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk.¹⁰

Pajak merupakan kewajiban tambahan setelah zakat yang merupakan sebuah kewajiban lain atas harta bagi umat muslim dimana manfaat dari pemungutan pajak digunakan untuk melakukan pembiayaan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dari aspek pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Dalam pemungutan pajak mengandung prinsip keadilan dimana merupakan pilar dalam ekonomi Islam yang bertujuan menghalangi timbulnya ketidakseimbangan distribusi kekayaan yang dapat merugikan salah satu pihak bahkan dapat memicu timbulnya konflik yang berdampak pada terganggu pembangunan perekonomian di wilayah. Pajak harus dipungut dengan asas keadilan maksudnya adalah tarif pajak yang “adil” bagi setiap kelompok atau individu wajib pajak.¹¹

Daerah diberikan kewenangan untuk memungut 16 jenis pajak, yaitu 5 pajak provinsi dan 11 pajak Kabupaten/kota. Pajak

¹⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Sygma Examedia arkanleema, 2013) at-taubah (9) :29, 193.

¹¹Muhammad Aldi Faridzi, Tulus Suryanto, and Yulistia Devi, “Pengaruh Pemahaman Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dalam Membayar Pajak Pp 23 Th 2018 (Studi UMKM Kecamatan Sukarame),” *Al-Mal: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam* 03, no. 01 (2022): 86.

yang dipungut Provinsi yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok dan Pajak Air Permukaan.

Dari kelima pajak yang dipungut oleh provinsi, Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak yang mempunyai potensi paling besar dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, karena saat ini transportasi adalah suatu kebutuhan bagi masyarakat.¹²

Tabel 1.1
Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan
di Provinsi Lampung Tahun 2017 s/d 2021

No	Jenis Kendaraan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Mobil Penumpang	207,919	229,729	249,693	261,815	278,927
2	Bus	4,504	4,597	4,775	4,875	4,914
3	Truk	150,105	159,094	166,380	170,719	176,769
4	Sepeda Motor	2,872,672	2,994,089	3,129,433	3,200,557	3,304,465
	Jumlah	3,235,200	3,389,527	3,550,281	3,637,966	3,765,075

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2022

Berdasarkan data dari Badan Statistik di atas dapat dilihat bahwa jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Lampung meningkat setiap tahunnya dari tahun 2017-2021. Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor disebabkan oleh kebutuhan masyarakat akan transportasi dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Kondisi ini merupakan potensi yang baik dalam peningkatan

¹²Pungky Dwi Martadani and Diana Hertati, "Efektivitas Pelaksanaan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Di Jombang," *Public Administration Journal* 1, no. 1 (2019): 36.

penerimaan daerah dari sektor pajak. Adanya peningkatan jumlah kendaraan bermotor diharapkan laju pertumbuhan penerimaan pajak kendaraan bermotor akan meningkat. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak masyarakat yang enggan membayar pajak. Menurut Kepala Bapenda Lampung, setidaknya terdapat dua juta kendaraan yang tidak bayar pajak yang kebanyakan adalah kendaraan roda dua. Maka dari itu, untuk menarik minat wajib pajak kendaraan bermotor dalam menunaikan kewajiban pajaknya, Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya dalam mengoptimalkan penerimaan daerah, yaitu dengan melakukan inovasi pada layanan samsat yang bertujuan untuk membantu kinerja Samsat induk dan mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak.

Selain itu, upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak adalah dengan memberikan insentif pajak atau pemutihan pajak kendaraan bermotor. Pemerintah Provinsi Lampung menggelar kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor berdasarkan Peraturan Gubernur No.14 Tahun 2021 Tentang Pemberian Keringanan atau Pembebasan Terhadap Pokok Tunggakan dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung Tahun 2021. Pergub tersebut berisi tentang pemberian keringanan atau pembebasan terhadap pokok tunggakan dan denda pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di Provinsi Lampung. Pemutihan pajak kendaraan di Provinsi Lampung dimulai pada 1 April 2021 sampai dengan 30 September 2021. Kebijakan ini bertujuan untuk menarik minat masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor sehingga terciptanya kedisiplinan dalam membayar pajak serta untuk meningkatkan pendapatan daerah yang turun dikarenakan pelemahan ekonomi akibat pandemi Covid-19

Tabel 1.2
Perkembangan Target dan Realisasi Pajak Kendaraan
Bermotor Tahun 2017 s/d 2021

No	TAHUN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	(%)	PERKEMBANGAN	
					Target (%)	Realisasi (%)
1	2017	684,000,000,000.00	677,101,130,141.00	98.99	12.32	15.90
2	2018	658,000,000,000.00	716,636,817,248.00	108.91	(3.80)	5.84
3	2019	750,000,000,000.00	799,767,612,251.00	106.64	13.98	11.60
4	2020	720,000,000,000.00	786,228,389,430.00	109.20	(4.00)	(1.69)
5	2021	890,000,000,000.00	880,359,093,903.00	98.92	23.61	11.97

Sumber : BAPENDA Provinsi Lampung, 2022

Data di atas menunjukkan pada tahun 2020 terjadi penurunan sebesar 1.69% dari tahun sebelumnya. Penurunan ini bukan tidak mungkin berasal dari menurunnya kepatuhan wajib pajak yang diakibatkan oleh krisis ekonomi selama masa pandemi. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2020 sebesar 11,97%. Namun pada tahun 2021 realisasi pajak kendaraan tidak mencapai target penerimaan yang telah ditargetkan.

Tabel 1.3
Perkembangan Target dan Realisasi Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor Tahun 2017 s/d 2021

No	TAHUN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	(%)	PERKEMBANGAN	
					Target (%)	Realisasi (%)
1	2017	623,000,000,000.00	615,251,612,101.00	98.76	(9.45)	7.12
2	2018	904,000,000,000.00	736,284,255,374.00	81.39	45.20	19,67
3	2019	767,000,000,000.00	728,156,240,209.00	94.94	(15.21)	(1.10)
4	2020	624,000,000,000.00	440,909,561,650.00	70.66	(18.64)	(39.45)

5	2021	624,000,000,000.00	613,520,230,500.00	98.32		39.15
---	------	--------------------	--------------------	-------	--	-------

Sumber : BAPENDA Provinsi Lampung, 2022

Jika melihat Tabel 1.3, realisasi BBNKB dari tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi. Penerimaan BBNKB paling rendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 440,909,561650 dan penerimaan BBNKB tertinggi ada pada tahun 2018 sebesar 736,284,255,374. Namun dilihat dari realisasinya, pemerintah belum bisa memaksimalkan pendapatan dari sektor BBNKB karena dari tahun 2017-2021 realisasi BBNKB tidak mencapai target yang telah ditentukan.

Banyaknya kendaraan bermotor di provinsi Lampung seharusnya pemerintah bisa mendapatkan penerimaan yang lebih dari sektor pajak kendaraan bermotor. Tetapi, dilihat dari realisasinya pemerintah belum bisa memaksimalkan pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor. Menurut Chau dan Leung faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak suatu negara diantaranya adalah tingkat kepatuhan wajib pajak di negara tersebut. Kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajibannya membayar pajak sesuai dengan undang-undang yang berlaku.¹³

¹³Randi Ilhamsyah, Maria G Wi Endang, and Rizky Yudhi Dewantara, "Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kewajiban Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang)," *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* 8, no. 1 (2016): 2.

Tabel 1.4
Perkembangan Target dan Realisasi Pendapatan Asli
Daerah Tahun 2017 s/d 2021

No	TAHUN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	(%)	PERKEMBANGAN	
					Target (%)	Realisasi (%)
1	2017	3,080,908,289,668.00	2,750,596,478,331.40	89.28	12.45	16.12
2	2018	3,565,784,165,917.41	2,864,235,753,079.13	80.33	15.74	4.13
3	2019	2,987,249,600,061.42	3,018,067,291,159.88	101.03	(16.22)	5.37
4	2020	2,962,401,653,051.14	2,842,286,479,070.36	95.95	(0.83)	(5.82)
5	2021	3,336,257,494,574.50	3,249,669,847,265.00	97.40	12.62	14.33

Sumber : BAPENDA Provinsi Lampung, 2022

Adanya kebijakan pemutihan pajak diharapkan mampu memaksimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, namun berdasarkan tabel di atas, Pendapatan Asli Daerah tahun 2021 juga tidak mencapai target yang telah ditentukan. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah dan menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Untuk itu, upaya mengevaluasi jalannya suatu kebijakan publik diperlukan agar dapat mengetahui penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak kendaraan bermotor dan target Pendapatan Asli Daerah tahun 2021.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENERAPAN KEBIJAKAN PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DALAM MEMAKSIMALKAN PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI LAMPUNG”**.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang ada di latarbelakang, terdapat beberapa poin yang akan menjadi topik pembahasan oleh penulis sesuai dengan permasalahan yang ada. Adapun identifikasi masalah dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Pada tahun 2021 realisasi pajak kendaraan bermotor tidak mencapai target penerimaan yang telah ditargetkan.
2. Realisasi BBNKB tidak mencapai target penerimaan yang telah ditargetkan.
3. Kurangnya minat wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
4. Dikeluarkannya Kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor yang berdasarkan Peraturan Gubernur No.14 Tahun 2021 Tentang Pemberian Keringanan atau Pembebasan Terhadap Pokok Tunggakan dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung Tahun 2021 yang mengakibatkan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor.

Untuk memperjelas ruang lingkup masalah dan menghindari pembahasan yang terlalu luas dalam penelitian ini, maka terdapat batasan masalah dalam penelitian ini. Fokus masalah dalam penelitian ini adalah pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang dilakukan mulai April 2021 sampai dengan September 2021. Selain itu, dalam penelitian ini menggunakan data PAD dan target dan realisasi PKB dan BBNKB tahun 2017-2021 dengan pertimbangan bahwa pemutihan pajak yang dilakukan di Provinsi Lampung terakhir dilaksanakan pada tahun 2017 dan dilaksanakan kembali pada tahun 2021.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama kendaraan

Bermotor dalam upaya memaksimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah?

2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penerapan kebijakan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor?
3. Bagaimana implementasi pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditinjau dari *Masalah Mursalah*?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama kendaraan Bermotor dalam upaya memaksimalkan penerimaan pajak daerah.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penerapan kebijakan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditinjau dari *Masalah Mursalah*.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis, diantaranya:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai pemutihan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan hubungannya dengan penerimaan pendapatan asli daerah dan segala ruang lingkungannya dan juga sebagai aplikasi teori yang telah di dapatkan peneliti selama menempuh perkuliahan, khususnya konsentrasi di bidang akuntansi perpajakan. Selain itu, juga dapat menambah kepustakaan

dibidang perpajakan dan dapat menjadi referensi untuk penelitian yang serupa dengan topik yang sama.

2. Secara Praktis

1. Bagi penulis

Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis, untuk memanfaatkan ilmu yang telah diberikan selama perkuliahan, khususnya ilmu yang berkaitan dengan ilmu perpajakan.

2. Bagi pembaca

Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pemutihan pajak kendaraan bermotor.

3. Bagi instansi

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan, bahan evaluasi maupun bahan pertimbangan untuk menyusun kebijakan pemutihan pajak kembali.

4. Bagi Akademisi

Menambah literatur mengenai program pemutihan pajak kendaraan bermotor bagi lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di UIN Raden Intan Lampung, khususnya jurusan Akuntansi Syariah.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian yang dilakukan oleh penulis erat kaitannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh beberapa orang, sebagai bahan review dan sebagai bahan perbandingan serta kajian oleh penulis. Adapun hasil-hasil penelitian berikut yang dijadikan bahan perbandingan yang tidak terlepas dari penelitian yang akan dilakukan penulis mengenai “Penerapan Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam Memaksimalkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung”

Tabel 1.5
Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

No	Nama Peneliti dan Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan penelitian ini
1	Kurniati Implementasi Kebijakan Pemberian Keringanan Pajak kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat	Berdasarkan penelitian tersebut, penerapan kebijakan pemutihan PKB dan BBNKB dari output yang dihasilkan sudah efektif dalam meningkatkan penerimaan PKB serta dapat menyumbang kontribusi pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) provinsi Kalimantan Barat. Namun disisi lain, kebijakan tersebut belum efektif dalam mencapai target realisasi BBNKB.	1. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif eksploratif. 2. Lokasi penelitian. 3. Tidak membahas mengenai <i>Masalah Mursalah</i> .
2	Punky Dwi Martadani dan Diana Hertati Efektifitas Pelaksanaan Program	Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Program pemutihan pajak kendaraan bermotor mampu mendorong masyarakat dalam membayar pajak hal ini membuktikan bahwa	1. Variabel penelitiannya hanya pemutihan pajak kendaraan bermotor. 2. Lokasi penelitian. 3. Tidak membahas

	<p>Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur di Jombang</p>	<p>pelaksanaanya sudah berjalan dengan efisien. Responsivitas dalam pelaksanaan pemutihan juga sudah efektif karena respon masyarakat dalam menanggapi kebijakan pemutihan sangat baik, ditandai dengan tercapainya target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor.</p>	<p>mengenai <i>Maslahah Mursalah</i>.</p>
3	<p>Achmad Husaini</p> <p>Analisis Efektifitas Kebijakan Pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kota Malang</p>	<p>Kesimpulan dari kebijakan pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Kota Malang telah berjalan dengan sangat efektif berdasarkan rasio efektifitas dimana memiliki capaian 110,07% pada tahun 2017 dan sebesar 107,67% pada tahun 2018. Faktor pendorong suksesnya pelaksanaan kebijakan pemutihan BBNKB adalah disambut dengan antusias oleh masyarakat yang berbondong-bondong</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi penelitian 2. Tidak membahas mengenai <i>Maslahah Mursalah</i>

		<p>untuk melakukan balik nama. Faktor penghambat kelengkapan persyaratan yang dibawa masih kurang lengkap, seperti untuk balik nama harus ada kwintansi jual belinya sebagai salah satu persyaratannya.</p>	
4	<p>Hanny Fachrunissa dan Icha Fajriana</p> <p>Analisis Pelaksanaan Dan Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Palembang (Studi Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang)</p>	<p>Hasil dari penelitian ini adalah Proses pelaksanaan pemutihan pajak pada masa pandemi ini tidak ada beda dengan proses pemutihan pajak sebelum pandemi, mulai dari persyaratan dan tata cara pembayaran pun masih sama dan tetap dilakukan di SAMSAT. Pemutihan pajak dilihat dari proses pelaksanaan dan data penerimaan pajak kendaraan bermotor terbilang efektif. Program ini sangat bermanfaat pada masa pandemi covid19 untuk meringankan beban denda wajib pajak dan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Objek penelitiannya hanya pemutihan pajak kendaraan bermotor. 2. Lokasi penelitiannya. 3. Tidak membahas mengenai <i>Masalah Mursalah</i>

		upaya untuk pemulihan ekonomi.	
5	Himmatul Ulya, Hendra Harmain, dan Rahmat Daim Harahap Efektivitas Program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Pada Kantor Bersama SAMSAT Natal)	Berdasarkan hasil penelitian, efektifitas program pemutihan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak membayar pajak di kantor Samsat Natal sudah sangat efektif, terlihat dari penerimaan PKB yang mengalami peningkatan saat dilakukan pemutihan. Implementasi pemutihan PKB sudah sesuai dengan teori dan syarat-syarat masalah mursalah.	1. Variabel Y yang digunakan. 2. Lokasi penelitian

H. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata

dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek alam. Peneliti adalah alat utama penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi dan analisis data dilakukan secara induktif untuk menyempurnakan pengumpulan data deskriptif. Hasil studi menekankan pentingnya makna, bukan generalisasi.¹⁴

2. Alasan Menggunakan Pendekatan

Dengan pendekatan kualitatif tersebut peneliti dapat menggali data-data, fakta-fakta yang lebih tuntas, pasti, sehingga memiliki kredibilitas yang tinggi. Pendekatan kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positifisme. Maka data yang didapatkan akan lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel dan bermakna sehingga tujuan penelitian dapat dicapai.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung yang terletak di Jl. Sultan Hasanudin No.45, Gn. MAS, Kec. Tlk. Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35221.

4. Sumber data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis data yaitu:

a) Data Primer

Data ini berupa teks hasil wawancara dan diperoleh dari hasil wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sampel dalam penelitian. Data dapat direkam atau dicatat oleh peneliti.¹⁵ Data primer yang diperlukan dalam

¹⁴Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021): 79.

¹⁵Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 209.

penelitian ini di dapat dari data yang diambil langsung dari penelitian dilapangan yaitu di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung dan wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dan utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan:

a) Observasi (Pengamatan)

Menurut Sudaryono, observasi merupakan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat secara detail kegiatan yang dilakukan oleh observee. Pada tahapan awal, observasi dilakukan secara umum dengan tujuan peneliti dapat mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin. Pada tahap selanjutnya, observasi yang dilakukan oleh peneliti mulai terfokus secara spesifik guna menemukan pola-pola prilaku dan hubungan yang terus menerus.¹⁶

b) Interview (wawancara)

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan mewawancarai responden untuk memperoleh informasi mengenai permasalahan yang diteliti.¹⁷ Penelitian ini menggunakan interview bebas terpimpin, artinya penginterview memberikan kebebasan kepada orang yang diinterview untuk memberi tanggapan atau jawaban sendiri.¹⁸ Dalam penelitian ini penulis melakukan tanya jawab tentang masalah yang terkait secara langsung dan

¹⁶Bernadus Bin Frans Resi, *Metodologi Pernelitian Kuantitatif Dan Kualitataif* (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022): 255.

¹⁷Uma Sekaran and Roger Bougie, *Metode Penelitian Untuk Bisnis*, 6th ed. (Jakarta: Salemba Empat, 2017), 170.

¹⁸Ghina Ulfa Sefurrohman et al., “Analisis Dampak Transformasi IAIN Menjadi UIN Dan Strategi Terhadap Perkembangan Keilmuan Ekonomi Islam,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 02 (2022): 1604.

terbuka kepada pegawai Bapenda Provinsi Lampung, yaitu Kasubdit Pajak 1 dan staff bidang pajak kendaraan bermotor. Selain itu juga melakukan wawancara dengan wajib pajak yang mengikuti pemutihan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.

c) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu cara mengumpulkan data melalui penelaahan sumber tertulis seperti buku, laporan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya yang memuat data atau informasi yang diperlukan.¹⁹ Dokumen yang digunakan adalah dokumen laporan penerimaan PKB dari pelaksanaan pemutihan PKB, laporan target dan realisasi PKB dan BBNKB, laporan target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Lampung, dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses menemukan dan mengatur secara sistematis catatan wawancara, catatan lapangan, dan bahan lain yang dikumpulkan sehingga dapat lebih memahami bahan-bahan tersebut dan membagikan hasilnya kepada orang lain. Analisis data juga mencakup kegiatan untuk mengerjakan data, mengatur, membagi menjadi bagian-bagian yang dapat dikelola, mensintesis, mencari pola, memahami apa yang penting dan apa yang sedang diteliti, dan memutuskan apa yang akan dilaporkan. Menurut Miles & Huberman yang diterjemahkan oleh Rohidi, Bogdan dan Biklen analisis data merupakan proses mengatur atau mengelola data agar dapat ditafsirkan lebih lanjut.²⁰

Analisis data dalam penelitian kualitatif meliputi pengumpulan data terbuka, didasari oleh pertanyaan umum dan analisis informasi dari responden. Proses analisis data dimulai dengan menelaah semua data yang tersedia dari

¹⁹Rifai Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021): 90.

²⁰Salim and Syahrum, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Konsep Dan Aplikasi Dalam Ilmu Sosial, Keagamaan Dan Pendidikan)* (Bandung: Citapustaka Media, 2012), 145-146.

berbagai sumber. Data-data tersebut dibaca dengan cermat, dipelajari dan direduksi dengan membuat ringkasan inti.

Teknik analisis data memiliki prinsip mengolah data dan menganalisis data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, terorganisir, dan bermakna. Miles dan Huberman dalam mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu.²¹

a) Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan sangat banyak dan perlu dicatat secara cermat dan detail. Oleh karena itu, perlu segera dilakukan analisis data dengan cara mereduksi data. Proses reduksi bertujuan untuk mengkategorikan, mengarahkan, memperjelas dan mengklarifikasi hal-hal dengan menghilangkan hal-hal yang kurang penting dan mengorganisir serta mengatur data agar data dapat dipahami dengan baik dan mengarah pada kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam reduksi data, peneliti melakukan seleksi, membuat ringkasan atau deskripsi singkat, dan data dikategorikan untuk membuat transkrip penelitian. Pada langkah ini, data yang tidak terkait dengan penelitian dihapus sehingga diperoleh data yang akan diteliti.

b) Penyajian Data

Setelah proses reduksi data, selanjutnya akan dilakukan proses penyajian data. Penyajian data adalah kumpulan informasi yang terorganisir untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Penyajiann data disusun dengan sistematis untuk membantu memudahkan penulis dalam melakukan proses analisis.

c) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan penafsiran terhadap hasil analisis dan interpretasi data. Kesimpulan

²¹Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Pendidikan Bahasa*, 1st ed. (Surakarta: Cakra Books, 2014), 173-177.

dalam penelitian kualitatif menjurus kepada jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan sebelumnya dan mengungkap “what” dan “how” dari temuan penelitian tersebut. Jawaban-jawaban dari temuan dan hasil penelitian tersebut dapat memberikan penjelasan simpulan dari pertanyaan penelitian yang diajukan.

I. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Hal ini dilakukan agar penelitian ini lebih sistematis dan teratur. Adapaun sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan ini berisi penegasan judul untuk skripsi mengenai Penerapan Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Serta Layanan Samsat Dalam Memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung. Menjelaskan istilah-istilah penting dalam judul skripsi yang penulis buat agar tidak ada kesalahpahaman serta kekeliruan. Kemudian menguraikan latar belakang masalah serta menjelaskan persoalan yang berkaitan dengan masalah penelitian. Lalu penulis mengidentifikasi dan membatasi masalah agar lebih fokus pada permasalahan penelitian. Menguraikan tujuan dan manfaat penelitian dan mencantumkan kajian terdahulu yang relevan agar penulis mengetahui hal-hal yang sudah diteliti dan belum diteliti. Kemudian menjelaskan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti dan memecahkan masalah.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisi uraian tentang tinjauan pustaka atau teori-teori yang melandasi penelitian, yaitu tentang dasar-dasar perpajakan, pajak daerah, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pemutihan Pajak, Bermotor dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan *Maslahah Mursalah*.

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

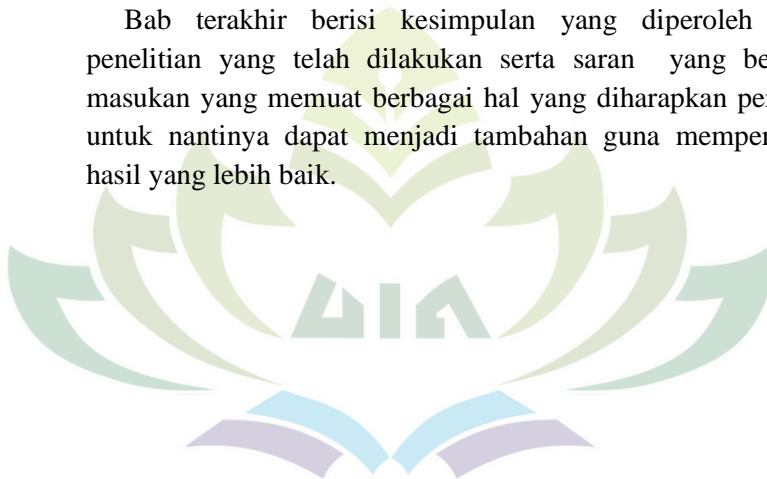
Pada bab III menjelaskan gambaran atau profil Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lampung. Penulis menguraikan mengenai sejarah singkat, visi dan misi, tugas dan kewenangannya, serta struktur organisasi. Pada bab ini juga menguraikan data-data yang ditemukan di lokasi penelitian.

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

Pada bab ini berisi hasil dari penelitian yang dilakukan serta pembahasan mengenai hasil tersebut. Bab ini meliputi pembahasan hasil penelitian dan analisis.

BAB V PENUTUP

Bab terakhir berisi kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan serta saran yang berupa masukan yang memuat berbagai hal yang diharapkan penulis untuk nantinya dapat menjadi tambahan guna memperoleh hasil yang lebih baik.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis tentang Penerapan Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam Memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Lampung, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan pemutihan pajak di Provinsi Lampung belum berjalan secara maksimal, berdasarkan analisis empat indikator mengenai implementasi kebijakan publik menurut Edward III. Adanya kebijakan pemutihan pajak, terjadi lonjakan yang cukup signifikan pada penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2021, namun meski terjadi peningkatan pada penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pendapatan Asli Daerah, pemerintah belum mampu memaksimalkan penerimaan pendapatan dikarenakan realisasi pendapatannya belum mencapai target yang ditetapkan.
2. Faktor pendukung dalam penerapan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor adalah adanya dukungan dan kerjasama yang baik dari banyak pihak, pemanfaatan sistem informasi dan teknologi, dan antusiasme masyarakat menyambut kebijakan pemutihan pajak.

Sedangkan faktor penghambat dalam penerapan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor adalah faktor ekonomi, BPKB yang masih di leasing dan masyarakat yang tidak mau repot mengurus surat-surat yang menjadi persyaratan untuk membayar pajak, belum bisa membayar pemutihan pajak melalui online, pandemi covid-19, kurangnya kesadaran wajib pajak dan masyarakat mengikuti pemutihan saat menjelang akhir penutupan.

3. Berdasarkan teori dan syarat-syarat *masalah mursalah* menurut Ulama Malikiyah dan Ulama Hanabillah, implementasi kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor sudah sesuai dengan teori dan syarat-syarat *Maslahah Mursalah*.

B. Rekomendasi

Berdasarkan penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka ada beberapa saran yang dapat diajukan kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan hasil penelitian yang telah diperoleh dalam penelitian ini.

Bagi Bapenda Lampung:

1. Apabila pemutihan PKB dan BBNKB akan diberlakukan kembali, diperlukan sosialisasi yang lebih aktif mengenai pemutihan tersebut dengan bekerja sama dengan dengan pihak kelurahan atau desa, sehingga dapat menjangkau masyarakat terpencil untuk ikut memanfaatkan kebijakan tersebut dan menambah fasilitas-fasilitas yang diperlukan saat pelaksanaan pemutihan pajak.
2. Kebijakan pemutihan PKB dan BBNKB akan lebih baik apabila tidak rutin dilaksanakan setiap tahun, namun dilakukan secara mendadak atau dilakukan dengan metode dan cara yang berbeda agar menghindari asumsi masyarakat yang hanya menunggu momen pemutihan pajak untuk membayar pajak.

Bagi Wajib Pajak:

Bagi wajib pajak, diperlukan kesadaran masyarakat akan pentingnya pembayaran pajak bagi pembangunan daerah sehingga masyarakat bisa terus berkomitmen untuk senantiasa patuh membayar pajak demi terwujudnya kesejahteraan bersama.

Bagi peneliti selanjutnya:

Sebaiknya melakukan penelitian pada lokasi dan narasumber yang beragam agar didapatkan berbagai informasi yang lebih beragam pula.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV.. Syakir Media Press, 2021.
- Abubakar, Rifai. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Adinugraha, Hendri Hernawan, and Mashudi. "Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2018): 65.
- Adiyanta, F.C Susila. "Karakteristik Responsif Peraturan Daerah Tentang Pajak-Pajak Daerah Sebagai Representasi Dan Partisipasi Kehendak Publik." *Administrative Law & Governance Journal* 2, no. 3 (2019): 384–85.
- Agama RI, Departemen. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Bandung: PT. Sygma Examedia arkanleema, 2013.
- Akib, Haedar. "Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, Dan Bagaimana." *Jurnal Administrasi Publik* 1, no. 1 (2010): 6.
- Ali, Karnila, and Nur Wahyu Ningsih. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran." *Jurnal Manajemen* 15, no. 1 (2021): 86.
- Andanari, I Gusti Agung Ayu Surya, and Gede Sri Darma. "Dua Sisi Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Bisnis E-Commerce." *RELASI: JURNAL EKONOMI* 18, no. 2 (2022): 207–9.
- Anggara, Sahya. *KEBIJAKAN PUBLIK*. Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- Artha Wulandari, Phaureula, and Emy Iryanie. *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*. Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2018.
- Cholili, Achmad. "Urgensi Dan Relevansi Al-Maslahah Al Mursalah Sebagai Metode Ijtihad Kontemporer." *Jurnal Studi Islam Dan Muamalah* 1, no. 2 (2016): 204–5.
- Devi, Yulistia, Nurhayati, Ghina Ulfah Saefurrohman, and Rakhmat. "Analisis Pengaruh Penggunaan Media Sosial Yang Aktif Dan Kualitas SDM Terhadap Tumbuh Kembang UMKM Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *FALAH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2022): 26.
- Digdowiseiso, Kumba. *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*. Jakarta: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LUPU-NAS), 2017.
- Fachrunissa, Hanny, and Icha Fajriana. "Analisis Pelaksanaan Dan Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Palembang." *Jurnal Ilmiah Ekonomi*

- Dan Bisnis Universitas Multi Data Palembang* 12, no. 1 (2022): 125–26.
- Faridzi, Muhammad Aldi, Tulus Suryanto, and Yulistia Devi. “Pengaruh Pemahaman Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dalam Membayar Pajak Pp 23 Th 2018 (Studi UMKM Kecamatan Sukarame).” *Al-Mal: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam* 03, no. 01 (2022): 86.
- Febriansyah, Erwin, Desi Febrianti, Melda Yunita, and Fadrul. “Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bengkulu.” *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Teknologi Informasi Akuntansi* 1, no. 2 (2020): 114.
- Ferry, William, and Dewi Sri. “Pengaruh Pemutihan Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Palembang.” *Jurnal Keuangan Dan Bisnis* 1, no. 8 (2020): 74.
- Ghesiyah, Gessy. “Pengaruh Pengetahuan Dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.” *Jurnal Riset Akuntansi Keuangan* 10, no. 1 (2022): 166.
- Hadi, Seno Sudarmono. “Analisa Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada BPRD DKI Jakarta.” *Moneter-Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 5, no. 2 (2018): 185–94.
- Husaini, Achamd. “Analisis Efektivitas Kebijakan Pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Kota Malang.” *Jurnal Profit* 14, no. 2 (2020): 53.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Fiqiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang: NoerFikri, 2019.
- Ilhamsyah, Randi, Maria G Wi Endang, and Rizky Yudhi Dewantara. “Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kewajiban Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang).” *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* 8, no. 1 (2016): 2.
- Indah, Tiara, and Puji Hariyanti. “Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Pada Dinas Kominfo Kota Tasikmalaya.” *Jurnal Komunikasi* 12, no. 2 (2018): 130–31.
- Islami, Debby, and Lilik Rahmawati. “Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2017.” *Journal Of Economics* 4, no. 2 (2020): 170.

- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Kurniati, Herlina, and Yulistia Devi. "Pengaruh Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016-2019 Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 7, no. 2 (2022): 187–208.
- Mardiasmo. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Andi, 2011.
- Martadani, Pungky Dwi, and Diana Hertati. "Efektivitas Pelaksanaan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Di Jombang." *Public Administration Journal* 1, no. 1 (2019): 36.
- Marzali, Amri. *Antropologi Dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Mustaqiem. *Pajak Daerah Dalam Transisi Otonomi Daerah*. Yogyakarta: FH UII Press, 2008.
- Nasir, Muhammad Safar. "Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekade Otonomi Daerah." *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan* 2, no. 1 (2019): 31.
- . "Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekadeotonomi Daerah." *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan* 2, no. 1 (2019): 30–45.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Pendidikan Bahasa*. 1st ed. Surakarta: Cakra Books, 2014.
- Nursalim. "Implementasi Kebijakan Tentang Pemungutan Retribusi Pasar Oleh Unit Pelaksana Teknik Pasar Cikatomas Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017." *Jurnal UNIGAL* 1, no. 2 (2018): 121.
- Quthni, Abu Yasid Adnan. "Implementasi Masalah Mursalah Sebagai Alternatif Hukum Islam Dan Solusi Problematika Umat." *Asy-Syariah* 5, no. 1 (2019): 4.
- Rahmawati, Anita Dwi. "Kepatuhan Santri Terhadap Aturan Di Pondok Pesantren Modern." Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015.
- Resi, Bernadus Bin Frans. *Metodologi Pernelitian Kuantitatif Dan Kualitataif*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022.
- Rompis, Natalia Ester, Ventje Ilat, and Anneke Wangkar. "Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Studi Kasus Pada Samsat Airmadidi)." *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 15, no. 3 (2015): 56.

- Salim, and Syahrums. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Konsep Dan Aplikasi Dalam Ilmu Sosial, Keagamaan Dan Pendidikan)*. Bandung: Citapustaka Media, 2012.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitaitaf*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Sefurrohman, Ghina Ulfa, Madnasir, Yulistia Devi, M Bahrudin, and Rahmad Nur Wicaksono. "Analisis Dampak Transformasi IAIN Menjadi UIN Dan Strategi Terhadap Perkembangan Keilmuan Ekonomi Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 02 (2022): 1604.
- Sekaran, Uma, and Roger Bougie. *Metode Penelitian Untuk Bisnis*. 6th ed. Jakarta: Salemba Empat, 2017.
- Shofiyah, Ziyadatus, and M. Lathoif Ghozali. "Implementasi Konsep Masalah Mursalah Dalam Mekanisme Pasar." *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam* 6, no. 2 (2021): 140.
- Subekti, Alvian Fajar, and Hermien Laksmiwati. "Hubungan Antara Religiusitas Dengan Kepatuhan Santri Dalam Mentaati Aturan Di Pondok Pesantren." *Jurnal Penelitian Psikologi* 6, no. 1 (2019): 3.
- Suryarini, Trisni, and Tarsis Tarmudji. *Pajak Di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Suwitri, Sri. "Konsep Dasar Kebijakan Publik." *Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro*, 2008.
- Syaripudin, Astri Febriana, Tuah Nur, and Dine Meigawati. "Komunikasi Kebijakan Publik Dalam Penyelenggaraan Reklame Di Kota Sukabumi." *Jurnal Ilmu Administrasi Publik UMA* 8, no. 2 (2020).
- Taufikurohman, Rizki, Evi Ekawati, and Yulistia Devi. "Pengaruh Kinerja Maqashid Syariah Dan Islam Reporting Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Modeerasi (Studi Empiris Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Tahun 2016-2020)." *Bukhori: Kajian Ekonomi Dan Keuangan Islam* 1, no. 2 (2022): 168.
- Thohari, A Ahsin. "Epistemologi Pajak, Perspektif Hukum Tata Negara Taxes Epistemology, Constitutional Law Perspective." *Jurnal Legislasi Indonesia* 8, no. 1 (2018): 69–78.
- Ulya, Himmatul, Hendra Hermain, and Rahmat Daim Harahap. "Efektivitas Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Dalam Perspektif Masalah Mursalah." *Journal Islamic Accounting Competency*, 2022, 87.

- Umar, Mukhsin Nyak. *Al-Maslahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*. 1st ed. Aceh: Turats, 2017.
- Wahab, Sholichin Abdul. *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Widajantie, Tituk Diah, and Saiful Anwar. "Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan)." *Behavioral Accounting Journal* 3, no. 2 (2020): 132.
- Wismayanti, Kadek Wiwin Dwi. *KEBIJAKAN PUBLIK*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Yani, Ahmad. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo, 2013.
- Yulitiawati, and Putri Okta Meliya. "Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten OKU." *Jurnal Ekonomika* 14, no. 2 (2021): 196–97.

